

Kota Bogor Raih TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali

BOGOR (IM)- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan penghargaan kota terbaik Se-Jawa Bali penerapan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 kepada Kota Bogor.

Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di sela kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakor-nas) Tim P2DD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa (3/10) sore.

"Penghargaan ini bukan tanpa sebab. Kota Bogor sudah menjalankan tata kelola yang baik. Terutama tata kelola pendapatan daerah yang hampir 99 persen sudah memanfaatkan transaksi elektronik atau digital. Di samping itu juga akuntabilitas serta sinergitas dengan beberapa stakeholders. Termasuk juga dalam rangka percepatan transaksi digital ini kami berupaya untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Jadi itu yang Kota Bogor sudah lakukan," ungkap Dedie dalam keterangan tertulis pada Rabu (4/10).

Dedie melanjutkan, kedepan, Kota Bogor juga sudah harus memulai mendigitalisasikan semua aspek. Termasuk membuat sebuah langkah bagaimana sisi pengeluaran daerah dilakukan semaksimal mungkin melalui proses digitalisasi.

"Jadi tata kelola, akuntabilitas dan sinergitas itu kata kuncinya. Harus kami kuatkan untuk mempertahankan digitalisasi yang sudah berjalan

ini," terang Dedie.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, penghargaan bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria sebagai daerah yang berhasil menerapkan perluasan digitalisasi daerah sebagai hasil evaluasi.

Dalam rakornas, Airlangga yang juga Ketua Satgas TP2DD menegaskan adanya urgensi mensinergikan berbagai inovasi dan inisiatif baru. Serta penguatan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Airlangga berharap digitalisasi pemerintah daerah dapat terus meningkat ke depan. Saat ini, kata Airlangga, level digitalisasi pemda telah meningkat 6,1% dari 67,5% pada semester II-2022 menjadi 73,6% pada semester III-2022.

"Dengan sebaran capaian Sumatera 133 pemda 81,1%, Jawa sebesar 118 pemda atau 99,2%, Kalimantan 32 pemda atau 52%, Bali dan Nusa Tenggara 26 pemda atau 51,9% serta Sulawesi dan Maluku 90 pemda atau 58,4%. Pemerintah optimis 75% target bisa dicapai," tegas Airlangga didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. ● **jai**

JADI FINALIS LOMBA SDG'S AWARD PROGRAM I-SIM FOR REGENCIES 2023

Capaian SDG's Pemkab Bogor Diverifikasi Tim Penilai



Jadi Finalis Lomba SDG's Award 2023, Capaian SDG's Pemkab Bogor diverifikasi.

BOGOR (IM)- Masuk sebagai finalis lomba Sustainable Development Goals (SDG's) Award melalui program I-SIM for Regencies Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima Tim Penilai Verifikasi dan Validasi Lapangan I-SIM For Regencies 2023.

Verifikasi ini dilaksanakan oleh Surveyor Indonesia didampingi oleh APKASI yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/10).

Mewakili Bupati Bogor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkapkan, sejak tahun 2016 program kegiatan di seluruh perangkat daerah Kabupaten Bogor, telah mengacu pada SDG's dan selalu diadakan kajian/evaluasi terhadap perkembangan capaian nilai SDG's setiap tahunnya.

"Percepatan pencapaian target SDG's tentunya merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu sinergi, kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan guna mencapai target SDG's tahun 2030. Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor kami mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Tim Penilai Lapangan Program I-SIM for Regencies yang telah berkenan hadir pada hari ini, karena Kabupaten Bogor masuk sebagai finalis lomba SDG's Award tahun 2023," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa, di tahun terakhir RPJMD Kabupaten Bogor periode 2018-2023, berbagai indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang saat pandemi sempat terpuruk di angka minus 1,76%, kini meningkat menjadi 5,85%; daya beli masyarakat meningkat 3,55%. Kemudian indeks pembangunan manusia meningkat dari 70,40 poin menjadi 71,20 poin, lalu angka kemiskinan turun dari 8,13% menjadi

7,73% dan tingkat pengangguran juga turun drastis dari 14,29% menjadi 10,64%.

Pada dasarnya kebijakan, program, kegiatan, maupun inovasi Pemkab Bogor telah sejalan dengan percepatan pencapaian SDG's. Salah satunya program gerakan Bogor Bebas Stunting (GoBest) mendukung 11 tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (IPB).

"Untuk itu, saya minta kepada kepala perangkat daerah dan para camat agar menyelesaikan program kegiatan dengan target tujuan SDG's. Mari kita berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan demi mencapai Indonesia emas pada tahun 2045," tegasnya.

Kemudian, Sekretariat I-SIM for Regencies diwakili oleh APKASI Mukhlis menyatakan, apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena telah berpartisipasi secara aktif di dalam beberapa kegiatan, hari ini kita bersam-sama menyaksikan Kabupaten Bogor telah berpartisipasi untuk kegiatan program I-SIM for Regencies 2023.

Program I-SIM for Regencies ini merupakan program inisiasi Surveyor Indonesia bekerjasama dengan APKASI dan KPPD serta disupervisi oleh Bappenas. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali menuju tahun 2030.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan kabupaten dapat mengukur atau menilai ketercapaian SDG'snya. Terlebih kami APKASI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas melalui kegiatan advokasi, fasilitasi dan kerjasama daerah sangat untuk mendukung program I-SIM for Regencies ini.

"Kami harap hasil atau nilai yang akan keluar di hari ini akan membawa Kabupaten Bogor menjadi salah satu pemenang dengan nilai terbaik untuk mendapatkan SDG's Award tahun ini," imbuhnya. ● **gio**

8 | Nusantara



JEMBATAN GANTUNG KONDISINYA MEMPRIHATINKAN

Pelajar SD melintas di jembatan gantung yang kondisinya memprihatinkan di Desa Parungkujang, Lebak, Banten, Rabu (4/10). Jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat di desa itu lantai jembatannya telah keropos dan beberapa tali seling putus.

Burhanudin Ajak Kadin Kabupaten Bogor Jadi 'Pemain' di PSN

Peluang usaha di bidang pariwisata, objek wisata, hotel hingga F&B harus dibaca oleh pengurus dan anggota Kadin Kabupaten Bogor. Peluang ini tidak hanya yang ada di wilayah Bumi Tegar Beriman, tetapi juga di luar Kabupaten Bogor, bahkan Provinsi Jawa Barat, kata Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin.

CIBINONG (IM)- Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengajak pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kabupaten Bogor untuk go public dengan terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tak ber-

gantung pada proyek yang ada di lingkup pemerintahan daerah.

"Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kabupaten Bogor, saya ajak tergabung dalam PSN, di mana ada Proyek Ja-

lan Tol Bogor-Sukabumi (Bocimi) Tahap 1, double track kereta Api Bogor-Sukabumi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Ciawi (Cipayung), pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung (Cimaci), Bogor Outing Ring Road ((BORR) 3, Depok-Antasari (Desari), Sentul Selatan -Karawang Barat, Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey," ucap Burhanudin saat menghadiri pengesahan dan pengukuhan pergantian antar waktu pengurus Kadin Kabupaten Bogor masa bakti 2021-2024 di Cibinong, Rabu (4/10).

Burhanudin menuturkan, pada PSN tersebut tidak hanya di bidang infrastruktur. Tetapi juga di bidang pari-

wisata seperti hotel, food and beeverage (F&B) dan lainnya yang bisa 'dimainkan' Kadin Kabupaten Bogor.

"Peluang usaha di bidang pariwisata, objek wisata, hotel hingga F&B harus dibaca oleh teman-teman pengurus dan anggota Kadin Kabupaten Bogor, tidak hanya yang ada di wilayah Bumi Tegar Beriman, tetapi juga di luar Kabupaten Bogor, bahkan Provinsi Jawa Barat," tutur mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP) tersebut.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Shinta Dhech Checawati menyambut baik ajakan Sekda Kabupaten Bogor. Untuk itu, dia akan berdiskusi dengan teman-teman pengurus dan anggota.

"Kami akan rapatkan barisan, peluang yang terbuka akan kami ambil hingga kita tak hanya menjadi 'penonton', tetapi juga 'pemain' pada PSN dan juga terlibat dalam industri pariwisata," kata Shinta Dhech Checawati.

Shinta pun menjelaskan bahwa teman-teman Kadin Kabupaten Bogor siap membantu pemerintah berupa keterlibatan dalam ketersediaan ketahanan pangan.

"Saat ini, Kabupaten Bogor belum swasembada pangan. Oleh karena itu, kami akan memaksimalkan peluang membantu pemerintah dalam menyediakan ketahanan pangan baik itu di pertanian, perikanan maupun peternakan," jelasnya. ● **gio**

Melalui Aplikasi 'Lapor Pak', Sekda Minta Kades dan Lurah Gali Potensi Pendapatan Daerah

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta kepala desa dan lurah untuk lebih menggali potensi pendapatan daerah dengan aplikasi Laporan Potensi Retribusi dan Pajak atau "Lapor Pak".

Hal ini diungkapkan Burhanudin saat mewakili Bupati Bogor pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Desa dan Kelurahan Melalui Aplikasi "Lapor Pak", di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (3/10).

Hadir pada acara tersebut, Koordinator Widya Iswara BPKSDM Provinsi Jawa Barat, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) wilayah Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, jajaran kepala perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bappenda, Arif Rahman, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Teuku Mulya, dan Kepala P3D wilayah Kabupaten Bogor, Yadi Cahyadi.

Mewakili Bupati Bogor, Sekda Burhanudin mengungkapkan, Pemkab Bogor terus berinovasi guna mengoptimalkan segala sumber pendapatan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Saya harap, kehadiran aplikasi "Lapor Pak" menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah yang ada di desa serta kelurahan se-Kabupaten Bogor," ungkap Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan, keberadaan aplikasi "Lapor Pak" semestinya dapat memotivasi desa agar semakin optimal menggali potensi pendapatan daerah. Semakin besar potensi pendapatan maka semakin besar potensi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang akan diterima desa. Begitu juga dengan kelurahan, agar mendukung program pelaporan ini. Meskipun kelurahan tidak secara langsung mendapatkan BHPRD, hal ini menjadi pertimbangan terkait anggaran pada kelurahan.

"Untuk itu, saya minta pemerintah desa dan kelurahan agar semangat mengenali, menggali, dan melaporkan potensi pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja masing-masing melalui sistem aplikasi "Lapor Pak", tandas Burhanudin.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Arif Rahman menerangkan, aplikasi "Lapor Pak" diluncurkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor.

Kehadiran "Lapor Pak" ini menjadi solusi dalam mengoptimalkan penggalian potensi-potensi pajak di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, mengingat wilayahnya yang luas," terang Arif.

Arif menambahkan, "Lapor Pak" ini bisa mendorong para kepala desa dan lurah aktif melaporkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya secara terus menerus. Aplikasi "Lapor Pak" dapat diakses menggunakan browser melalui komputer atau smartphone dengan akses internet. ● **gio**

Atang Trisnanto Coret Kegiatan Inagurasi Senilai Rp6 Miliar

BOGOR (IM)- Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto memastikan, kegiatan inagurasi di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Dedie A Rachim tidak jadi dilaksanakan.

"Dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah meniadakan inagurasi dan kegiatan akhir masa jabatan lainnya senilai Rp6 miliar," ungkap Atang Trisnanto kepada wartawan, Rabu (4/10).

Atang Trisnanto melanjutkan, sebagai gantinya inagurasi diganti dengan kegiatan biasa. Kendati demikian, apabila nantinya saat penetapan APBD Perubahan 2023 setelah evaluasi gubernur, kegiatan itu ada maka DPRD bisa saja menolaknya.

"Jadi wali kota berpesan kepada TAPD agar tak membuat inagurasi. Kalau ada ASN yang memberi penghormatan di akhir masa jabatan, itu urusan lain. Yang pasti anggaran Rp6 miliar itu tak ada," terang Atang.

Sedangkan untuk kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Atang memastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan bersumber dari APBD.

"Kalau APEKSI dari anggaran di luar APBD," tambahnya.

Atang menjelaskan, mengenai pendapatan APBD Perubahan terdapat kenaikan dari pendapatan transfer senilai Rp120 miliar naik serta retribusi pajak sebesar

Rp36 miliar.

"Kenaikan itu membuat belanja daerah naik, sehingga APBD Perubahan 2023 menjadi Rp3,89 triliun," jelasnya.

Diketahui, sorotan terhadap Pemkot Bogor seiring adanya rencana Munaslub APEKSI, Dasa Warsa, dan inagurasi di akhir periode Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim, terus bergulir.

Hal itu tak terlepas dari tingginya kebutuhan anggaran yang disebut DPRD mencapai Rp6 miliar. Padahal, Pemkot Bogor sempat mengalami defisit di APBD Tahun Anggaran 2023 hingga Rp147 miliar, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dan penyesuaian anggaran.

Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri pun mempertanyakan, urgensi inagurasi dan Munaslub tersebut. Bahkan, ia menyebut bahwa anggaran tersebut adalah 'anggaran huru hara'.

"Apa outputnya bagi warga Kota Bogor? Lebih baik pemerintah fokus saja kepada program-program yang dapat langsung dirasakan masyarakat," tujuannya kepada wartawan.

Saeful menyarankan, akan lebih baik apabila capaian akhir tahun masa kepemimpinan Bima Arya dan Dedie A Rachim lebih baik dipublikasikan cukup mengenai pendapatan APBD Perubahan terdapat kenaikan dari pendapatan transfer senilai Rp120 miliar naik serta retribusi pajak sebesar



Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin minta Kades dan Lurah terus menggali potensi pendapatan daerah dengan Aplikasi "Lapor Pak".